

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGELOLAAN DANA DI DESA NUNUANAH KECAMATAN AMFOANG TIMUR KABUPATEN KUPANG

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan nasional. Dana desa sebagai wujud komitmen pemerintah pusat terhadap penguatan kelembagaan pemerintahan desa telah diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam konteks ini, penelitian mengenai “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang” menjadi sangat relevan sebagai bentuk evaluasi implementasi kebijakan publik di tingkat akar rumput.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non partisipatif, wawancara terstruktur terbuka dengan kepala desa dan perangkat desa, serta dokumentasi terhadap dokumen APBDesa dan laporan realisasi keuangan desa dari tahun anggaran 2019 hingga 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek perencanaan, desa telah melakukan musyawarah desa (Musrenbangdes) yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan RPJMDes dan RKPDes. Namun, perencanaan kerap terkendala oleh keterlambatan pagu indikatif dana desa dari pemerintah kabupaten, sehingga menyebabkan keterlambatan pengesahan APBDesa. Dalam pelaksanaan, kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sesuai prioritas, meskipun realisasi anggaran tidak selalu optimal akibat keterlambatan pencairan dana dari pusat.

Pada aspek penatausahaan, penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah diterapkan, namun pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa masih terbatas sehingga beberapa laporan administrasi belum memenuhi standar. Dalam pelaporan, pemerintah desa telah menyampaikan laporan realisasi semesteran dan akhir tahun kepada camat dan Bupati Kupang, meskipun dokumentasi pendukung seperti bukti pengeluaran dan daftar hadir kegiatan masih belum tertata dengan baik.

Pertanggungjawaban dana desa telah dilakukan secara formal melalui forum pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Namun, akuntabilitas substansial masih menjadi tantangan karena minimnya evaluasi berbasis hasil (outcome) dari penggunaan dana desa. Pemerintah desa lebih fokus pada realisasi anggaran daripada dampak nyata dari kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor penghambat pengelolaan dana desa di antaranya adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa, perubahan regulasi yang cepat, kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah daerah, serta belum optimalnya peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengawasan. Sebagai solusi, peneliti merekomendasikan pelatihan berkelanjutan, penyederhanaan regulasi, penguatan peran BPD, serta pengembangan sistem pelaporan berbasis hasil.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur tentang pengelolaan keuangan desa berbasis partisipatif dan akuntabel, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi konkret bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Desa Nunuanah telah berada di jalur yang benar, namun masih membutuhkan penguatan dari sisi manajerial, administratif, dan partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lain dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga mendorong perlunya integrasi antara sistem pengawasan vertikal dari pemerintah pusat/daerah dengan sistem partisipatif horizontal dari masyarakat desa, demi menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi laporan

keuangan, serta kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana desa ke depan.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini antara lain perlunya peningkatan kapasitas SDM desa melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan tenaga pendamping desa yang kompeten, perbaikan sistem pelaporan berbasis digital, serta penguatan peran BPD dalam pengawasan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan komunikasi dan sinergi lintas sektoral dengan desa untuk mempercepat proses verifikasi dan evaluasi APBDesa.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan desa berbasis partisipatif dan akuntabel, serta memberikan gambaran nyata tentang praktik pengelolaan dana desa di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam reformasi pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Kupang maupun secara ...

Dengan memperhatikan temuan dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Nunuanah telah menunjukkan upaya yang cukup baik dari sisi sistem dan prosedur, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan sinergis antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah agar dana desa dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahte...

**Kata Kunci: Pengelolaan Dana Di Desa Nunuanah Kecamatan Amfoang Timur.**